

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaish- E- Muhammed alias JEM atau Tentara Muhammad yang dibentuk pada tahun 2000, merupakan kelompok Islam radikal bersenjata yang bermarkas di Pakistan. Kelompok tersebut mempunyai tujuan untuk melemahkan dan menggulingkan kontrol India atas Kashmir yang dikelola India melalui kekerasan dan serangan-serangan terhadap target keamanan serta pemerintah dan tentunya, untuk melawan pasukan Hindu dan Sikh yang berkali-kali membantai umat Islam di Kashmir. Kelompok ini didirikan oleh Maulana Masood Azhar, yang sebelumnya pernah berjuang di bawah panji Harkat-ul-Mujahidin yang memiliki kaitan dengan al-Qaeda. Azhar mendirikan JEM setelah ia dibebaskan dari tahanan India pada tahun 1999, dengan imbalan lebih dari 150 sandera yang ditawan dalam penerbangan Indian Airlines yang telah dibajak dan dialihkan ke Kandahar, Afghanistan (Roggio, Pakistan Again Puts Jaish E Mohammed Leader Under Protective Custody, 2016).

JEM terus mengoperasikan bagian-bagian terbuka di Pakistan meskipun pada tahun 2002 JEM dilarang kegiatannya. Pada tahun 2000 sejak pembebasan pendiri Jaish-E-Mohammed yaitu Masood Azhar, JEM telah melakukan banyak serangan teroris yang mematikan termasuk pemboman bunuh diri di gedung majelis legislatif Jammu dan Kashmir di ibukota Kashmir yang dikelola pemerintah India di Srinagar pada Oktober 2001 menewaskan lebih dari 30 korban jiwa. Pada Juli 2004, pihak Pakistan berwenang menangkap JEM atas penculikan dan pembunuhan jurnalis Amerika Serikat Daniel Pearl. Pada tahun 2006 JEM mengaku bertanggung jawab atas sejumlah serangan, termasuk

pembunuhan beberapa pejabat polisi India di Srinagar. Anggota JEM juga terlibat dalam pemberontakan Masjid Merah pada tahun 2007 di Islamabad. Asmatullah Moavia, militan yang saat ini terkait dengan Tehrik-e Taliban Pakistan, berpisah dari kelompok Masjid Merah setelah insiden itu ada ketidaksepakatan mengenai reaksi terhadap kasus tersebut. Pada tahun 2009, pihak berwenang mempunyai otoritas dalam menahan beberapa anggota JEM yang dicurigai ikut serta dalam serangan 3 Maret terhadap Tim Kriket Sri Lanka di Lahore (Adikhari, 2010).

Pada Juni 2008, JEM dilaporkan sedang bekerja untuk menyelesaikan perbedaan antara kelompok-kelompok ekstremis Pakistan lainnya dan mulai fokus pada Kashmir ke Afghanistan untuk meningkatkan serangan terhadap Amerika Serikat dan pasukan Koalisi. Faksi-faksi nakal dari JEM, bersama dengan kelompok-kelompok regional lainnya, dapat melakukan serangan terhadap kepentingan-kepentingan Barat di Pakistan serta serangan, entitas pemerintah (BBC, 2002).

JEM memiliki setidaknya 100 pendukung bersenjata yang berlokasi di Pakistan, wilayah Kashmir dan Doda di India selatan, dan di Lembah Kashmir. Pendukung sebagian besar adalah orang Pakistan dan Kashmir, tetapi juga termasuk orang Afghanistan dan veteran Arab dari perang Afghanistan melawan Soviet. Kelompok ini menggunakan senapan mesin ringan dan berat, senapan serbu, mortir, bahan peledak improvisasi, dan granat berpeluncur roket dalam serangannya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjuk JEM sebagai Organisasi Teroris Asing pada tahun 2001 (BBC, 2002).

JEM memproyeksikan Kashmir sebagai “*pintu gerbang*” ke seluruh India yang muslimnya juga dianggap membutuhkan pembebasan. Setelah membebaskan Kashmir, kelompok ini bercita-cita untuk

membawa jihad-nya ke daerah lain di India, dengan maksud mengusir umat Hindu dan Non-Muslim lainnya dari anak benua India. Pada 10 Februari 2018 dini hari, Jaish-e-Mohammed Fidayeen menyerang sebuah kamp Angkatan Darat India di Sunjuwan, Jammu, di negara bagian India, Jammu dan Kashmir. 11 tentara, 4 penyerang dan 1 warga sipil tewas dan 20 lainnya terluka termasuk 14 tentara, lima wanita dan anak-anak. Khususnya, serangan ini bertepatan dengan peringatan kematian Guru Afzal, seorang terpidana dalam serangan parlemen India tahun 2001. Serangan telah digambarkan sebagai salah satu yang terburuk sejak serangan Uri 2016. Pria yang digambarkan oleh Angkatan Darat India sebagai penguasa serangan, Mufti Waqas, seorang komandan di Jaish E. Mohammed, terbunuh dalam operasi militer pada 5 Maret 2018 di Awantipur Kashmir selatan (BBC, 2002).

Konflik antara Pakistan dan India sudah terjadi sejak terpisahnya wilayah Pakistan dari India pada tahun 1947. Pasca pemisahan tersebut Pakistan dan India memiliki hubungan diplomatik yang tidak baik. Pakistan dan India menjalin beberapa kerjasama dalam banyak bidang, namun kedua negara tersebut juga saling bersaing untuk menjadi yang paling kuat serta berpengaruh di kawasan Asia Selatan termasuk di antaranya terkait dengan wilayah Kashmir. Kashmir merupakan salah satu wilayah yang berada diantara India dan Pakistan dimana penduduknya mayoritas umat Muslim. Setelah pemisahan kedua negara Pakistan dan India, Kashmir menjadi wilayah yang paling diperebutkan kedua negara karena secara geografis, Kashmir memiliki banyak kelebihan dan keunikan (William, 2015)

Kashmir merupakan wilayah yang secara geografis memiliki banyak keunggulan, yakni letaknya yang strategis. Letak geografis Kashmir sangat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara besar.

seperti sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan China, sebelah timur berbatasan dengan China Sinkiang dan Tibet, sebelah barat berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan, sebelah selatan berbatasan dengan India(Shah, t.thn.). Selain keunggulan geografis, Kashmir juga memiliki kelebihan lain yaitu melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA). Wilayah Kashmir sangat terkenal dengan keindahan alamnya karena pegunungan dan lembah-lembah hijau yang belum pernah tersentuh.Terdapat beberapa sungai besar yang melewati dan mengalir lembah Kashmir seperti sungai Indus, Zanskar dan Jhelum (Curtis, t.thn.). Sungai Indus merupakan sungai utama yang mengalir dari Kashmir ke Pakistan sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi India yang menguasai Kashmir (Widyawati, 2010).

Kashmir juga merupakan tanah yang kaya akan hasil bumi seperti emas. Selain emas, hasil bumi lainnya juga melimpah berupa batu zamrud dan batu delima yang berpotensi bagi peningkatan ekonomi India di Kashmir.Potensi-potensi yang ditawarkan Kashmir beserta kepentingan kedua negara tersebut inilah yang akhirnya menjadi pemicu utama tidak konflik Kashmir. Kedua negara saling melancarkan beberapa aksi untuk mengancam satu sama lain hingga terjadi perang sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1947, 1965, 1971 dan 1999.Konflik Kashmir semakin mengalami eskalasi hingga menjadi sorotan internasional pada bulan Januari 1948, namun kemudian kasus tersebut mereda setelah muncul indikasi bahwa kedua negara yakni India dan Pakistan mulai cenderung menyelesaikan permasalahan sengketa Kashmir lewat diplomasi dan dialog bilateral(Cohen, Kashmir : The Roads Ahead, 2015).

Penduduk Kashmir mayoritas terdiri dari masyarakat Muslim yang pro-Pakistan.Sementara itu, para penguasa di Kashmir didominasi kaum Hindu sehingga lebih cenderung pro-India.Hal ini menjadikan masalah

sengketa sulit mencapai kesepakatan permanen sebab dari internal Kashmir sendiri sering terjadi pemberontakan, terorisme, dan penyerangan bersenjata. Secara historis Kashmir merupakan wilayah integral dari negara India. Setelah Pakistan memisahkan diri, Kashmir menjadi wilayah yang diperebutkan. Pakistan terus menerus mengklaim Kashmir dengan alasan bahwa Kashmir dan Pakistan memiliki landasan agama yang sama (Widyawati, 2010).

India dan Pakistan melakukan serangan nuklir satu sama lain, hal tersebut menimbulkan konflik yang semakin memanas, di mana masing-masing pihak saling unjuk kekuatan. India berharap bahwa ketegangan yang meningkat dapat memaksa Pakistan untuk menghukum kelompok-kelompok militan yang bermarkas di wilayahnya (Widyawati, 2010).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah

Bagaimana peran kelompok Jais E Mohammed dapat memicu ketegangan diplomatic Pakistan India pasca Sunjuwan Attack di Kashmir 2018?

C. Kerangka Teori

Dalam menghubungkan rumusan masalah dengan hipotesa penulis menggunakan Teori Keamanan, Konsep Non-State Actor, serta Konsep Irredentisme.

1. Teori Keamanan

Pada masa terjadinya Perang Dingin, keamanan nasional diartikan sebagai hubungan konflik dan kerjasama antar negara. Definisi keamanan bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, definisi dari keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula

soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita dan Yani, 2005:119).

Steven Spiegel mengatakan bahwa dengan perluasan definisi keamanan nasional tersebut, maka akan semakin memperbesar bahaya. Ancaman yang mungkin akan dihadapi negara bukan saja hanya ancaman nuklir, tetapi juga ancaman terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, terjadi perluasan ancaman dalam keamanan nasional yang berkaitan dengan beberapa dimensi, yaitu: Pertama, dimensi 'the origin of threats'. Bila pada masa Perang dingin, ancaman berasal dari luar negara, kini ancaman bisa saja berasal dari dalam negara yang biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti kudeta, konflik etnis, budaya, dan agama.. Negara harus memperhatikan semua aspek kehidupan beserta kewaspadaan terhadap celah bagi ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi.

Kedua, dimensi '*the nature of threats*'. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional sebagaimana disebut di atas telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit. Persoalan keamanan menjadi lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan bahkan isu-isu seperti demokratisasi dan HAM.

Ketiga, dimensi '*changing response*'. Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah organisasi politik terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan baru menyatakan bahwa tingkat

keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini dikarenakan human security merupakan agenda pokok di muka bumi ini dan oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar semua individu. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan akan ditentukan pula oleh kerjasama transnasional antara aktor non negara.

Keempat dimensi '*core values of security*'. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada '*national independence*', kedaulatan, dan integritas teritorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun tataran global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini adalah penghormatan terhadap HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas baik perdagangan narkoba, money laundering dan terorisme. Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan (Spiegel, 2004:404).

Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara. Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan

kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya (Al Araf & Aliabbas, 2007:34).

2. Konsep Non-State Actor

Dapat dikatakan tidak ada peristiwa yang berlangsung di dunia ini tanpa kehadiran yang lebih lanjut dari para aktor non-negara, tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga lintas negara. Sementara, peran negara sendiri tampak semakin tergerus begitu dipengaruhi sikap tanggung jawabnya oleh sepak terjang para aktor non-negara. Sulit menyangkal bahwa kehadiran peran aktor non-negara begitu dominan dalam mempengaruhi tata dunia (Burchill, 2009).

Sekalipun baru memperlihatkan peran aktor non-negara yang semakin dominan, dalam kenyataannya, aktivitas mereka tetap memiliki keterbatasan atau juga dengan peran aktor negara. Hal ini disebabkan karena peran aktor negara sebagai pelaku formal dalam membentuk peraturan untuk membuat kebijakan yang masih dibutuhkan, dan juga dalam mengawasi peran para pelaku internasional (Burchill, 2009).

Jadi, aktor negara tidak bisa meninggalkan peran tradisionalnya sebagai pengatur untuk pemelihara keseimbangan serta pemberi jaminan atas terciptanya keteraturan hubungan interaksi para aktornya. Sementara, para aktor negara menjadi pelaku yang tidak lagi bersifat komplementer, tetapi diketahui sudah berperan sebagai pelaku hubungan internasional yang aktif sangat dinamis dalam peran dan interaksinya dewasa ini, dalam kondisi dunia yang semakin terhubung serta terbuka, akibat kemajuan teknologi derasnya globalisasi (Perwita, 2006).

Pertumbuhan *non-state actors*, *Multinational Corporation*, *International Institution*, dan organisasi transnasional di akhir periode Perang Dunia II membuat konsep *statecentric* dipertanyakan. Dengan revolusi teknologi dalam komunikasi dan transportasi, politik global dicirikan dengan tumbuhnya saling ketergantungan, persebaran transnasionalisme, dan munculnya global baru yang meliputi bidang ekonomi, budaya, dan ranah teknis. Muncullah Liberal-Puralis yang mencari paradigma pluralistik alternatif untuk menilai kompleksitas dan transformasi dari Negara modern (Jackson, 2009).

Dalam esainya, Robert Keohane dan Joseph Nye meneliti fenomena interaksi transnasionalisme yang mereka definisikan sebagai pergerakan benda berwujud atau tidak berwujud yang melewati batas Negara yang dilakukan oleh satu aktor yang bukan Negara. Mereka menyimpulkan bahwa Negara bukan satu-satunya aktor penting dan juga bukan sekedar *gatekeeper* (Machiavelli, 1515).

Dalam penelitiannya, Kjell Skjelbaek menemukan bahwa INGO bertambah dari 1012 pada tahun 1954 menjadi 1899 pada 1968. Penelitian ini dilengkapi dengan penelitian Richard Mansbach yang mengatakan bahwa keterlibatan *non-state actors* juga meningkat. Dia Juga menemukan bahwa *non-state actor* lebih cenderung menyebabkan konflik daripada aktor pemerintahan. Dari penelitian itulah, dia menyimpulkan bahwa Realist salah dalam menggambarkan politik dunia. Realis mengabaikan diversitas dari non-state actor terkait dengan politik dunia seperti halnya aktor birokratik.

Robert Keohane dan Joseph Nye memunculkan suatu asumsi yang merupakan

model yang ideal untuk membandingkan dan mengkontraskan pandangan ideal dan realis dalam politik dunia yaitu dengan asumsi yang dikenal sebagai '*Complex Interdependence*'. Ini semacam seperangkat channel yang menghubungkan masyarakat dalam artian antar Negara, antar pemerintahan, dan relasi transnasional dengan agenda yang terdiri dari berbagai isu yang tidak dikelompokkan dengan jelas dan hirarki yang konsisten dan dengan *economic interest* yang pijakannya sama dengan *military interest*. Mereka mengklaim bahwa Negara bukanlah aktor tunggal dalam politik dunia dan bukanlah aktor yang bersifat tunggal. Mereka terdiri dari birokrasi yang bersaing. Memaksakan dirinya mungkin merupakan kebijakan yang kurang efektif sekarang. Isu hirarki tradisional dengan masalah militer atau keamanan yang mendominasi sektor ekonomi dan sosial sekarang digantikan dengan tidak adanya isu yang jelas.

Dalam kondisi demikian, mereka melihat bahwa *non-state actor* menjadi mungkin terlibat langsung dalam politik dunia. Tokoh ini penting bukan hanya karena aktivitas mereka untuk mengejar *interest*-nya, tetapi juga segala tindakan mereka membuat peraturan pemerintah di berbagai Negara menjadi lebih *sensitive* antara satu dengan lainnya.

Mereka memprediksi bahwa nantinya Negara akan menggunakan institusi internasional dan aktor transnasional untuk memperoleh power, di samping penguatan militer. Ini tidak selalu berlaku, tergantung pada situasinya. Terkadang suatu fenomena terjadi diantara Realis dan Complex Interdependence. Realis mungkin superior dalam menjelaskan fenomena, tetapi seringkali Complex Interdependence menggambarkan realitas yang lebih akurat dan

bahkan mencirikan sluruh hubungan dari Negara tertentu.

3. Konsep Iredentisme

Konsep politik dimana suatu negara berhasrat untuk menganeksasi wilayah yang dikuasai oleh negara lain atas dasar persamaan etnis, keterkaitan sejarah dan budaya, baik aktual maupun hanya dugaan. Konsep ini sering dikemukakan oleh penganut pan-nasionalisme untuk menyatukan identitas politik, kebudayaan, dan geografi politik antara dua negara yang bersangkutan.

Karena sebagian besar perbatasan wilayah telah dipindahkan atau ditetapkan ulang dari waktu ke waktu, kebanyakan negara-negara besar secara teoretis bisa mengklaim wilayah-wilayah tetangga mereka.

Penaklukan Jerman terhadap Austria danpenganeksasian Sudetenland yang berbahasa Jerman dari CekoSlowakia pada tahun 1938 adalah salah satu contoh dari irredentisme.

Beberapa negara telah menjadi sasaran irendentisme yang potensial bagi negara tetangga mereka. Negara-negara Eropa Timur pasca-Perang Dunia I terbentuk dari wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Austria-Hungaria; perbatasan negara-negara Balkan dan Timur Dekat yang ditetapkan oleh Sekutu menyisakan banyak wilayah-wilayah baru dengan kelompok etnis minoritas yang tidak puas dengan penetapan perbatasan tersebut dan pada akhirnya memisahkan diri. Di Afrika, sebagian besar negara memiliki perbatasan yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan kolonial Eropa, bukannya berdasarkan kelompok etnis dan persamaan bahasa. Oleh sebab itu, kelompok etnis yang sama dibagi menjadi beberapa negara yang berbeda, misalnya bangsa

Yoruba yang di bagi menjadi Nigeria dan Benin. Contoh lainnya adalah etnis Melayu dipisahkan menurut jajahan Inggris (Malaysia, Brunei dan Singapura) dan Belanda (Indonesia). Di beberapa wilayah, permasalahan iredentisme ini terus menjadi sumber sengketa hingga saat ini.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa

1. Peran Kelompok Jaish-E-Mohammed dalam memicu ketegangan diplomatic Pakistan India pasca Sunjuwan Attack di Kashmir pada tahun 2018 menolak umat Hindu dan Non-Muslim lainnya dari anak benua India.
2. Peran Kelompok Jaish-E-Mohammed dalam memicu ketegangan diplomatic Pakistan India pasca Sunjuwan Attack di Kashmir pada tahun 2018 Kelompok Jais-E-Mohammed ingin Kashmir berada di bawah pemerintahan Pakistan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kelompok sosial Jaish-E-Mohammed dalam memicu ketegangan diplomatik antara Pakistan dengan India pasca Sunjuwan Attack di Kashmir pada tahun 2018

F. Jangkauan Penelitian

Penulis membahas tentang peran Jais E Mohammed dalam memicu ketegangan diplomatic Pakistan India pasca Sunjuwan Attack di Kashmir tahun 2018. Fakta yang terkait dan dapat menunjang proses menganalisis serta menginterpretasikan sesuai dengan fakta-fakta yang sudah berhasil dikumpulkan

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menekankan pada studi pustaka (review) baik berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen, internet serta sumber-sumber lain. Apabila data-data yang diperlukan sudah terkumpul maka dianalisis dan diinterpretasikan.
2. Metode Pengolahan Data Metode penelitian yang akan dipakai dalam mengolah data adalah metode kualitatif dengan jenis diskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan fakta- fakta yang terkait dan dapat menunjang proses menganalisis serta menginterpretasikan sesuai dengan fakta-fakta yang sudah berhasil dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahasmengenai sejarah terbentuknya kelompok Jaish E Mohammed visi misi, prinsip emblem, struktur sosial kelompok Jaish-e-Mohammed.

BAB III menjelaskan tentang dinamika konflik yang terjadi antara Pakistan dan India dari awal mula konflik hingga menjelang kejadian *Sunjuwan Attack* 2018.

BAB IV merupakan penerapan Teori Non-State Actor, Konsep Keamanan, dan Konsep Separatisme Irredentisme yang digunakan, kemudian dihubungkan dengan aspek penelitian atau pokok rumusan masalah yakni mengenai peran kelompok Jaish E. Mohammed dalam memicu ketegangan diplomatic Pakistan India pasca *Sujuwan Attack* di Kashmir 2018.

BAB V Merupakan bagian penutup dari keseluruhan bab dan berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya serta sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diteliti melalui penulisan penelitian.